

REPUBLIK INDONESIA

MATERI PEMAPARAN

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

PADA RAKORBANGPUS 16 SEPTEMBER 2002

KEMENTERIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN TIMUR INDONESIA
2002

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
PADA RAKORBANGPUS 16 SEPTEMBER 2002

I. PENDAHULUAN

Pemerataan dan peningkatan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, khususnya kawasan yang kurang berkembang seperti di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah terpencil, pemerintah telah menjadikannya sebagai komitmen nasional. Pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) pada tahun 2000 merupakan salah wujud pelaksanaan komitmen tersebut.

Dalam rangka mengemban tugas membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang percepatan pembangunan KTI, Menteri Negara PPKTI menyelenggarakan 4 (empat) fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Pengkoordinasian dalam perumusan, penetapan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Serta 4 (empat) kewenangan, yaitu :

1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
3. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya.
4. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di atas, maka kegiatan-kegiatan Kementerian PPKTI diarahkan untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan KTI, yaitu :

1. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial regional intra KTI dan antara KTI dengan Kawasan Barat Indonesia.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta serta kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Meningkatkan kesiapan KTI menghadapi era perdagangan bebas dengan akulturasi budaya dan penguasaan teknologi.
4. Mewujudkan interdependensi antarkawasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mempercepat dan memantapkan pemulihan ekonomi di KTI.

Untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan KTI ini, pemerintah sejak tahun 1993 telah membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) sebagai wadah koordinasi di tingkat Pusat mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis dan program prioritas untuk meningkatkan pembangunan di KTI beserta penentuan tahapan dan prioritas

pelaksanaannya. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden dan dibantu oleh Menteri Negara PPKTI sebagai Ketua Harian.

Melalui Dewan ini pengambilan keputusan kebijakan pembangunan KTI dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno DP-KTI yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian DP-KTI berdasarkan laporan hasil kerja dari setiap Pokja dan Sekretariat. Sedangkan hasil keputusan tersebut selanjutnya diputuskan sebagai keputusan Dewan melalui Sidang Kabinet Terbatas KTI / Rapat Paripurna DP-KTI yang dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua DP-KTI. Dengan mekanisme tersebut maka diharapkan Keputusan dewan merupakan keputusan pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait.

II. PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2003

Untuk mendukung pencapaian tujuan percepatan pembangunan KTI tersebut di atas, maka pada tahun anggaran 2003 mendatang, Kementerian PPKTI mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana disampaikan dalam matrik Rencana Kegiatan Tahun 2003 terlampir.

Khusus mengenai Jakstranas PPKTI, sesuai dengan perintah Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 29 Juni 2001, perlu disusun konsep Jakstranas PPKTI sebagai acuan/pedoman bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pembangunan agar pencapaian sasarannya dapat lebih terarah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya Jakstranas PPKTI ini supaya mengikat bagi seluruh pelaku pembangunan di KTI perlu ditetapkan dalam bentuk keputusan DP-KTI dan pelaksanaannya ditetapkan melalui Instruksi Presiden kepada seluruh departemen/LPND terkait dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut setiap departemen/LPND terkait dan pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana tindak (*action plan*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

Secara garis besar, Jakstranas PPKTI ini disusun dengan Visi : "*Terwujudnya Kawasan Timur Indonesia sebagai kawasan yang maju, berkelanjutan, mempunyai kesetaraan akses ekonomi dan keberdayaan antarkawasan serta menjadi bagian tatanan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Untuk mencapai visi di atas, maka misi percepatan pembangunan KTI adalah :

1. Memacu pertumbuhan ekonomi regional secara integratif;
2. Mengembangkan sumberdaya manusia setempat agar dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pembangunan KTI;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pembangunan dengan pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah (*networking*) yang saling menguntungkan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Mengoptimalkan kerjasama ekonomi sub regional;
6. Meningkatkan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;
7. Memanfaatkan sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam hayati dengan penuh bijaksana berdasarkan asas konservasi agar lestari dan ditujukan bagi kesejahteraan, terutama masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan periodisasi pembangunan Indonesia, maka percepatan pembangunan KTI dibagi ke dalam dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek (sampai 2004) dan sasaran jangka menengah (sampai 2010).

Sasaran sampai dengan tahun 2004 adalah :

1. Tercapainya pendapatan per kapita mendekati rata-rata nasional;
2. Tercapainya Indeks Pembangunan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia mendekati rata-rata nasional;
3. Tercapainya peningkatan porsi investasi berkisar 20 persen dari total investasi nasional dan ekspor KTI meningkat sekitar 20 persen;
4. Tercapainya kesiapan kelembagaan pemerintah, ekonomi dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua secara berdayaguna dan berhasilguna;
5. Terselesaikannya konflik-konflik horisontal yang saat ini terjadi;
6. Tercapainya pengembangan sistem nasional jangka menengah di KTI yang merupakan penetapan kawasan dan kota prioritas yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Sasaran sampai dengan tahun 2010 adalah :

1. Tercapainya daya beli berada pada rata-rata nasional;
2. Tercapainya Indeks Pembangunan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia berada pada rata-rata nasional;
3. Tercapainya porsi investasi di atas 20 persen dari total investasi nasional dan ekspor dari KTI tumbuh di atas 20 persen;
4. Tertata dan mantapnya kelembagaan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan dalam mempercepat pembangunan KTI;
5. Tercapainya pengembangan sistem nasional jangka panjang di KTI yang merupakan penetapan kawasan dan kota prioritas yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
6. Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI ini merupakan pedoman bagi pembangunan KTI yang memerlukan upaya-upaya bersama yang serius, terpadu dan konsisten dari semua pelaku (*stakeholders*) pembangunan. Untuk melaksanakan Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI, maka ditetapkan prioritas pembangunan, tahapan dan sumber-sumber pendanaannya.

Sedangkan keberhasilan dari tujuan di atas tergantung kepada sikap mental, tindak, semangat, ketaatan, profesionalisme, disiplin dan komitmen dari semua pelaku (*stakeholders*) kelembagaan di KTI. Untuk itu, pemerintah perlu sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI ini. Secara lengkap konsep Jakstranas terlampir.

Matrik Perencanaan Kegiatan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2003

No	Proyek	Inputs	Process	Outputs	Outcomes	Impacts
1.	Pengembangan Usaha di Kawasan Timur Indonesia	Rp. 1 milyar	- Perumusan kebijakan investasi dan pembiayaan kewirausahaan dan daya saing PKMK di KTI. - Kajian peluang investasi agribisnis pertanian dan kehutanan di KTI - Pengkajian pengembangan sektor primer untuk komoditas unggulan dalam rangka menunjang perekonomian di KTI. - Penyusunan Kebijakan Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil terutama masyarakat petani tambak dan nelayan kecil. - Perumusan kebijakan investasi dan pembiayaan sentra-sentra industri dan perdagangan di KTI.	- Kebijakan investasi dan pembiayaan di KTI. - Hasil kajian pengembangan sektor primer untuk komoditas unggulan di KTI. - Kebijakan Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil di KTI.	- Meningkatnya investasi dan pembiayaan dalam rangka pecepatan pembangunan di KTI. - Meningkatnya komoditas unggulan sektor primer di KTI. - Berkembangnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di KTI.	- Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di KTI - Meningkatnya ekspor komoditas unggulan sektor primer. - Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di KTI yang tumbuh dan berkembang.
2.	Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di KTI	Rp. 6 milyar	- Penyusunan Konsolidasi kebijakan rekonsilasi rehabilitasi dan normalisasi kehidupan masyarakat di Maluku, Maluku Utara. - Penyusunan konsolidasi kebijakan rekonsilasi rehabilitasi dan normalisasi kehidupan masyarakat di Papua. - Penyusunan Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan pola kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. - Penyusunaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan industri sekitar lokasi usaha. - Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Lembagaa Adat. - Pengkajian dampak kebijakan dan	- Kebijakan rekonsilasi rehabilitasi dan normalisasi kehidupan masyarakat di Maluku, Maluku Utara dan Papua. - Tersusunnya Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan pola kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. - Tersusunnya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan industri. - Tersusunnya Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Adat. - Hasil kajian dampak kebijakan dan strategi	- Terlaksananya rekonsiliasi, rehabilitasi dan normalisasi kehidupan masyarakat di Maluku, Maluku Utara dan Papua. - Kelembagaan dan pola kemitraan usaha di KTI yang berjalan dengan baik. - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan industri. - Berkembang dan tetap lestarinya Kelembagaan Adat. - Berkembangnya wilayah pertumbuhan dan perbatasan yang mendorong terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi di KTI. - Meningkatnya Usaha Kecil dan	- Kehidupan bermasyarakat di KTI yang kondusif. - Terjalinnya kemitraan usaha yang baik di KTI. - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi industri. - Kelembagaan adat yang lestari dan berkembang. - Berkembangnya pusat perekonomian baru di KTI. - Kemandirian Usaha keci dan menengah dan berkembangnya

No	Proyek	Inputs	Process	Outputs	Outcomes	Impacts
			strategi pengembangan kawasan cepat tumbuh berdasarkan potensi unggulan wilayah dan wilayah strategis dalam upaya memperbaiki kualitas dan kesejahteraan sosial masyarakat. - Studi Potensi Wilayah Perbatasan dalam mewujudkan suatu kawasan yang mendorong terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi pada 4 lokasi di KTI (3 propinsi). - Studi Penyusunan strategi dan Kebijakan percepatan pembangunan wilayah pertumbuhan pada beberapa kawasan andalan di KTI (7 propinsi). - Studi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan peranan KAPET di Kawasan Andalan se KTI (8 Propinsi). - Penyusunan Kebijakan Masyarakat Pedalaman dan Suku Terasing. - Perumusan kebijakan konsolidasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi wilayah di KTI. - Kajian peluang investasi dan pembiayaan sektor pertambangan dan energi di KTI. - Pemberdayaan dan pemanfaatan lahan untuk budi daya SDA Hayati (pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan) di KTI. - Pengembangan data potensi SDA Hayati dan Non Hayati untuk pembangunan di KTI. - Pemberdayaan pengelolaan dan pemanfaatan potensi unggulan	pengembangan kawasan cepat tumbuh. - Rumusan Potensi Wilayah Perbatasan yang mendorong terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi pada 4 lokasi di KTI (3 propinsi). - Tersusunnya strategi dan Kebijakan percepatan pembangunan wilayah pertumbuhan pada kawasan andalan di KTI (7 propinsi). - Rumusan hasil studi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan peranan KAPET di Kawasan Andalan se KTI (8 Propinsi). - Tersusunnya Kebijakan Masyarakat Pedalaman dan Suku Terasing. - Kebijakan konsolidasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi wilayah di KTI. - Hasil kajian peluang investasi dan pembiayaan sektor pertambangan dan energi di KTI. - Tersusunnya pemberdayaan dan pemanfaatan lahan untuk budi daya SDA Hayati di KTI. - Tersedianya data potensi SDA Hayati dan	Menengah dan peranan KAPET di KTI. - Berkembang dan keluar dari keterisoliran Masyarakat Pedalaman dan Suku Terasing. - Sarana dan prasarana ekonomi wilayah di KTI yang memadai. - Meningkatnya investasi dan pembiayaan sektor pertambangan dan energi di KTI. - Meningkatnya pemberdayaan dan pengelolaan potensi SDA Hayati dan Non Hayati untuk pembangunan di KTI. - Berkembangnya seni dan kebudayaan daerah yang mendukung peningkatan kunjungan wisata. - Rumusan hasil studi kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.	KAPET di KTI. - Pertumbuhan yang pesat masyarakat pedalaman dan suku terasung. - Besarnya minat investor untuk untuk menanamkan modalnya di KTI . - Terpenuhinya pendanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA. - Berkembangya seni dan budaya daerah menjadi kebudayaan nasional dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata. - Tertatanya strategi pengembangan Kawasan Timur Indonesia secara terintegrasi.

No	Proyek	Inputs	Process	Outputs	Outcomes	Impacts
			SDA Non Hayati di KTI. - Perumusan Kebijakan Pengembangan dan Pemibinaan Promosi Seni Budaya daerah. - Penyusunan Studi kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.	Non Hayati untuk pembangunan di KTI. - Tersusunya rumusan pemberdayaan pengelolaan dan pemanfaatan potensi unggulan SDA Non Hayati di KTI. - Kebijakan Pengembangan dan Pemibinaan Promosi Seni Budaya daerah. - Rumusan hasil studi kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.		
3.	Pengembangan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Rp. 3,5 milyar	- Penyusunan model penanggulangan pasca kerusuhan, kerjasama dengan perguruan tinggi di KTI (tadulako, samratulangi dan mulawarman). - Sosialisasi hukum adat dan ulayat di KTI di kaitkan dengan hukum pertanahan nasional. - Penyusunan kajian tentang efektivitas kelembagaan pemerintah pusat, daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan dalam penanggulangan masalah-masalah sosial. - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Repeta. - Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Meneg PPKTI. - Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi. - Peningkatan konsolidasi program antar sektor/lembaga/daerah.	- Tersusunnya model penanggulangan pasca kerusuhan - Terlaksananya sosialisasi hukum adat dan ulayat di KTI di kaitkan dengan hukum pertanahan nasional - Kajian efektivitas kelembagaan pemerintah pusat, daerah dan pemberdayaan masyarakat - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Repeta - Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Kantor Meneg PPKTI - Tersusunnya pedoman monitoring dan evaluasi - Terlaksananya	- Pelaksanaan penanggulangan pasca kerusuhan secara baik. - Meningkatnya pemahaman hukum adat dan ulayat di KTI di kaitkan dengan hukum pertanahan nasional. - Kelembagaan pemerintah pusat, daerah dan pemberdayaan masyarakat yang efektif. - Tersusunnya Renstra dan Repeta PPKTI. - Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Meneg PPKTI. - Pedoman monitoring dan evaluasi. - Sinkronisasi dan harmonisasi program Kementerian PPKTI dengan lintas sektor dan daerah.	- Normalisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. - Terciptanya tata ruang yang baik. - Pemerintahan yang efektif, efisien dan fresponsive serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban. - Terselenggaranya program dan kegiatan yang direncanakan - Terwujudnya *Good Govenrnance*. - Berjalannya koordinasi dengan lintas sektor dan daerah dengan baik.

No	Proyek	Inputs	Process	Outputs	Outcomes	Impacts
			- sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian PPKTI.	konsolidasi program antar sektor/ lembaga/daerah - Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi program Kementerian PPKTI		
		Rp. 2 milyar	– Pengumpulan data-data tentang Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik kebijakan yang sudah ada, produk perundang-undangan maupun data profil daerah dan hasil-hasil kajian. – Brainstorming konsep percepatan pembangunan KTI – Penyusunan konsep kebijakan dan strategi nasional PPKTI dengan stakeholder baik dari departemen /lembaga pemerintah non departemen terkait, LSM, perusahaan di KTI, DPR dan pakar. – Kompilasi masukan dari departemen terkait dan daerah. – Sosialisasi konsep Jakstranas PPKTI.	– Tersusunnya konsep Jakstranas PPKTI. – Ditetapkannya Keputusan DP-KTI tentang Jakstranas PPKTI sebagai acuan/pedoman bagi seluruh pelaku (stakeholders) pembangunan agar pencapaian sasarannya dapat lebih terarah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. – Ditetapkannya Inpres tentang pelaksanaan Jakstranas.	– Terlaksanakannya Inpres Jakstranas sebagai acuan Departemen/LPND dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan pembangunan.	– Terwujudnya Kawasan Timur Indonesia sebagai kawasan yang maju, berkelanjutan, mempunyai kesetaraan akses ekonomi dan keberdayaan antarkawasan serta menjadi bagian tatanan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meneg PPKTI	Rp. 1,5 milyar	- Peningkatan pengembangan sistem informasi Kantor Meneg PPKTI. - Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Meneg PPKTI.	- Terlaksananya pembangunan Sistem informasi Kantor Meneg PPKTI. - Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Meneg PPKTI.	- Tersedianya data dan informasi Percepatan Pembangunan KTI. - Operasionalnya kegiatan kantor dengan baik yang didukung sarana dan prasarana Kantor yang memadai.	- Berjalannya program dan kegiatan kantor yang didukung oleh tersedianya data dan informasi serta sarana dan prasarana yang memadai.